**BAB II**

**LANDASAN TEORI**

Dalam bab ini akan dibahasa mengenai teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Konsep Pengembangan Produk Unggulan Daerahdijelaskan mulai dari definisi hingga langkah pemilihan kriteria dan penilaiannya. Model-model yang ada dari entitas ini dibahas juga untuk menambah pemahaman karakter pada entitas Kompetensi Inti Industri Daerah.Kemudian pembahasan teori dilanjutkan pada pendekatan metoda Logika Fuzzy sebagai nominan *assessment tools* yang akan digunakan.

* 1. **Daya Saing Daerah**

Peningkatan daya saing nasional perlu ditingkatkan pada sektor-sektor produksi, utamanya industri, pertanian dan pariwisata. Pembangunan industri didorong untuk meningkatkan nilaitambah berbagai komoditi unggulan di berbagai Wilayah Indonesia, khususnya koridor koridor ekonomi dalam kerangka *Masterplan* Percepatan dan Perluasan PembangunanEkonomi Indonesia (MP3EI).

Namun demikian, daya saing nasional dapat meningkat, jika daya saing daerah lebih baik.Peningkatan daya saing nasional tidak dapat lepas dari kemampuan daerah untukmeningkatkan daya saingnya. Oleh sebab itu, peningkatan daya saing nasional perlu dilakukanmelalui peningkatan daya saing daerah secara merata dan terintegrasi.

Dalam upaya menciptakan pertumbuhan ekonomi di daerah yang lebih berkualitas dan berkelanjutan, perekonomian daerah perlu didukung dengan investasi di sektor­sektor produktif dan jasa. Saat ini, kita merasakan betapa pentingnya peranan investasi swasta, mengingat keterbatasan kapasitas fiskal pemerintah (Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota). Keterbatasan ini akan semakin menyulitkan kita dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah, bila pertumbuhan ekonomi di daerah pun mengandalkan konsumsi masyarakat. Saya akui, tidak ada jurus kunci dan jalan mulus untuk memecahkan semua itu, tetapi saya percaya bila Pemerintah Daerah bersungguh­sungguh bekerja dengan baik, maka pertumbuhan ekonomi yang dirangsang oleh investasi swasta akan terus mekar, dan pada akhirnya akan menyejahterakan rakyat di daerah.

Kita semua telah mengetahui bahwa investasi dapat menjadi pendorong roda perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan, tatkala semua pihak mendapat manfaat (gain) maksimal dari aktivitas tersebut. Dalam situasi ini, pengusaha mendapat keuntungan yang memadai untuk melakukan penambahan modal, meningkatkan produktivitas, meningkatkan kesejahteraan pekerja, dan melakukan ekspansi usaha. Bagi tenaga kerja, dorongan kegiatan ekonomi melalui investasi dan perdagangan dapat mengurangi pengangguran. Kita pun sudah sangat paham iklim investasi di daerah belum tercipta sebagaimana diharapkan. Daya saing antar daerah di bidang ini juga masih sangat timpang. Ada daerah yang memiliki daya saing tinggi, berbanding terbalik dengan daerah lain, yang daya saingnya sangat rendah.

Pemerintah Daerah perlu mengambil langkah­langkah kreatif dan inovatif dalam menciptakan iklim yang kondusif, terutama pemerintahan, dan lingkungan ekonomi. Bila hal ini dapat dilakukan oleh semua Pemerintah Daerah, maka akan tercipta lingkungan ekonomi yang kompetitif. Setiap wilayah atau daerah akan memiliki keunggulan tertentu yang dapat merangsang para pengusaha untuk berinvestasi. Dalam hubungan itu, pemerintahan yang memiliki wilayah dengan keunggulan yang relatif sama, bahkan berbeda sekalipun perlu menjalin kerjasama yang bersifat produktif dalam menciptakan lingkungan ekonomi yang berdaya saing.

Daya saing nasional ditentukan oleh daya saing daerah­daerah yang ada di negara tersebut. Selanjutnya daya saing negara/daerah ditentukan oleh daya saing perusahaan­perusahaan yang ada di negara/daerah tersebut dan berbagai variabel lainnya. Kualitas kebijakan dan kelembagaan di suatu negara dan daerah akan mempengaruhi kemampuan perusahaan­perusahaan di wilayahnya meningkatkan produktivitas

Dengan pengertian itu, daya saing negara/daerah tidak hanya ditentukan oleh daya saing perusahaan saja. Yang bersaing memang bukan negara/ daerah, tetapi perusahaan atau industri yang ada dalam negara/daerah yang bersangkutan dengan perusahaan atau industri yang berada di negara/daerah lain. Suatu negara/daerah yang memiliki daya saing tinggi belum tentu seluruh perusahaan dan industri di negara/daerah tersebut memiliki daya saing di pasar domestik maupun internasional. Daya saing negara/daerah lebih problematik daripada daya saing perusahaan. Bila perusahaan kalah bersaing, maka perusahaan bisa bangkrut dan selanjutnya keluar dari bisnis yang digelutinya. Namun, negara/daerah tidak memiliki bottom line atau tidak akan pernah “ke luar dari arena persaingan”

* + 1. **Konsep Daya Saing Daerah**

Daya saing dapat dinilai dengan berbagai macam pendekatan dan indikator yang padaprinsipnya menunjukkan kemampuan yang lebih unggul secara kuantitas ataupun kualitaspada skala nasional antar daerah ataupun pada skala internasional antar negara. Sementaraitu, Abdullah, et.al (2002) mendefinisikan daya saing daerah sebagai kemampuan daerahdalam mencapai pertumbuhan ekonomi untuk menciptakan tingkat kesejahteraan yang tinggidan berkelanjutan, sehingga mampu untuk bersaing di tingkat domestik dan internasional. Dengan demikian, daya saing merupakan akumulasi dari berbagai faktor yang dimulai daripenyusunan kebijakan, sampai dengan implementasi berupa kelembagaan dan tata kelola danberupa pembangunan infrastruktur. Muara dari implementasi kebijakan-kebijakan tersebutadalah tercapainya produktivitas suatu negara/daerah sehingga akan meningkatkankesejahteraan rakyat pada skala perekonomian nasional/daerah. Semakin kompetitif dayasaing sebuah sistem perekonomian, maka pembangunan akan tumbuh lebih cepat**.**

Dalam mendefinisikan daya saing perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

* Daya saing mencakup aspek yang lebih luas dari sekedar produktivitas atau efisiensi pada level mikro. Hal ini memungkinkan kita lebih memilih mendefinisikan daya saing sebagai “kemampuan suatu perekonomian” daripada “kemampuan sektor swasta atau perusahaan”.
* Pelaku ekonomi (*economic agent*) bukan hanya perusahaan, akan tetapi juga rumah tangga, pemerintah, dan lain-lain. Semuanya terpadu dalam suatu sistem ekonomi yang sinergis. Tanpa memungkiri peran besar sektor swasta perusahaan dalam perkonomian, fokus perhatian tidak hanya pada itu saja. Hal ini diupayakan dalam rangka menjaga luasnya cakupan konsep daya saing.
* Tujuan dan hasil akhir dari meningkatnya daya saing suatu perekonomian tak lain adalah meningkatnya tingkat kesejahteraan penduduk di dalam perekonomian tersebut. Kesejahteraan *(level of living*) adalah konsep yang maha luas pasti tidak hanya tergambarkan dalam sebuah besaran variabel seperti pertumbuhan ekonomi. Perumbuhan ekonomi hanya satu aspek dari pembangunan ekonomi dalam rangka peningkatan standar kehidupan masyarakat.
* Kata kunci dari konsep daya saing adalah “kompetisi”. Disinilah peran keterbukaan terhadap kompetisi dengan para kompetitor menjadi relevan. Kata “daya saing” menjadi kehilangan maknanya pada suatu perekonomian yang tertutup.

Keunggulan daya saing daerah penting karena dua alasan. *Pertama*, untuk menyadarkan bahwa keunggulan kompetitif suatu perusahaan tidak sepenuhnya tergantung pada kemampuan internal masing­masing perusahaan. Ada tempat­tempat di mana orang atau perusahaan lebih mudah menciptakan usaha yang kompetitif dibanding tempat lain. Hal ini tidak hanya berlaku untuk negara, tetapi juga berlaku untuk wilayah dalam suatu negara.

*Kedua*, ada dua tipe keunggulan kompetitif yang harus dikenali, yaitu keunggulan kompetitif statis dan keunggulan kompetitif dinamis. Keunggulan kompetitif statis merujuk pada faktor lokasi geografis, sedangkan keunggulan kompetitif dinamis merujuk pada permasalahan tenaga kerja (seperti upah, kualitas, kedisiplinan, dan produktivitas), iklim usaha, dan faktor lain yang berpengaruh terhadap industri di daerah itu. Lokasi geografis merupakan faktor daya saing yang penting, tetapi hal tersebut juga dimiliki banyak daerah lain. Di samping itu ke depan kemajuan teknologi dan globalisasi lambat laun akan mengurangi signifikansi faktor lokasi. Dalam kondisi demikian, faktor­-faktor lain seperti kualitas tenaga kerja dan iklim usaha akan menjadi keunggulan kompetitif yang penting terutama ketika di daerah lain hal itu merupakan masalah

Dalam era desentralisasi dan globalisasi, peningkatan daya saing yang berbasis pada pengetahuan, teknologi dan inovasi menjadi kian penting dalam pengembangan ekonomi daerah. Dalam globalisasi, tatanan sistem ekonomi baru yang dihadapi memiliki ciri yang cukup berbeda dengan tatanan ekonomi lama. Perbedaan tersebut terlihat baik dari karakteristiknya maupun peranan dari para pelakunya. Dalam tatanan ekonomi baru, persaingan yang terjadi adalah persaingan global, persaingan antardaerah tinggi, dan sumber keunggulan daya saing berasal dari inovasi, kualitas, waktu penyampaian ke pasar, dan biaya.Daerah akan mengembangkan suatu keunggulan kompetitif berdasarkan kemampuan inovasi, dan vitalitas ekonomi merupakan hasil langsung dari persaingan industri lokal. Berbagai faktor yang dapat menentukan daya saing antara lain :

1. Kondisi Faktor seperti tenaga kerja terampil yang dibutuhkan, sumber daya alam, infrastruktur khusus yang tersedia, dan hambatan­hambatan tertentu;
2. Kondisi Permintaan seperti permintaan sektor rumah tangga atau pelanggan­pelanggan lokal akan produk berkualitas yang mendorong perusahaan­perusahaan untuk berinovasi;
3. Dukungan Industri Terkait: industri­industri pemasok lokal yang kompetitif yang menciptakan infrastruktur bisnis dan memacu inovasi dan memungkinkan industri­industri untuk *spin off;*
4. Strategi, Struktur, dan Persaingan Perusahaan (Iklim Usaha): tingkat persaingan antar industri lokal yang lebih memberikan motivasi dibanding persaingan dengan pihak luar negeri, dan “budaya” lokal yang mempengaruhi perilaku masing­masing industri dalam melakukan persaingan dan inovasi;
5. Peranan Pemerintah: Peristiwa historis dan campur tangan pemerintah cenderung berperan secara signifikan dalam peningkatan daya saing daerah; dan
6. Kemampuan dan sinergi dari para pelaku usaha, yaitu usahawan/ pengusaha, profesional, dan pekerja/ buruh

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa daya saing daerah adalah “Kemampuan perkonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional”

* + 1. **Indikator Utama Daya Saing Daerah**

indikator penentu daya saing daerah adalah Perekonomian Daerah, Keterbukaan, Sistem Keuangan, Infrastruktur dan Sumber Daya Alam, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Sumber daya manusia, Kelembagaan, *Governance* dan Kebijakan Pemerintah, dan Manajemen dn Ekonomi Makro.

Indikator makro daya saing merupakan jaringan antar indikator dan sub-sub indikator yang saling *intercorect*, saling hubungan secara terikat dan terkait (*inheren* dan *cohern*) antar dan lintas indikator dan sub indikator, yang pada implementasinya memerlukan pengelolaan yang terintegratif, terencana dan konsisten serta berkesinambungan diantara sembilan indikator penentu daya saing. Implementasi terintegrasi, mengandung makna bahwa langkah-langkah yang ditempuh untuk mewujudkan perekonomian daerah secara makro sudah barang tertentu melibatkan semua pihak, baik institusi pemerintah daerah, swasta dan lembaga sosial, seta pihak­pihak secara langsung dan tidak langsung secara nyata andil dalam penggerakan danpertumbuhan perekonomian daerah. Terencana, asumsi langkah perencanaan adalah untuk memperkecil kegagalan, artinya aktivitas pengembangan daya saing akan gagal total tanpa perencanaan, dan peluang untuk berhasil lebih besar apabila diawali dengan perencanan yang baik. Konsisten, menunjukan kepada langkah sentripetal yakni gerak yang mengarah sesuai perencanaan atau gerak taat asas, tidak mengerjakan yang tidak terencanakan, taat asas merupakan perwujudan dari konsistensi sebuah kesepakatan, tidak merubah kesepakatan tanpa kesepakatan berikutnya, perencanaan adalah kesepakatan. Adapun berkesinambungan merupakan pekerjaan tiada henti, akan tetapi terus menerus dilakukan pada tahun pertama diikuti tahun kedua dan seterusnya.

Indikator dan sub-indikator dari daya saing daerah tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar II.1 Indikator Utama Penentu Daya Saing Daerah

Sumber : Buku Pegangan Perencanan Pembanngunan Daerah 2012-2013, Bappenas

Masing-masing indikator di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perekonomian Daerah

Perekonomian daerah merupakan ukuran kinerja secara umum dari perekonomian makro (daerah) yang meliputi penciptaan nilai tambah, akumulasi kapital, tingkat konsumsi, kinerja sektoral perekonomian, serta tingkat biaya hidup. Indikator kinerja ekonomi makro mempengaruhi daya saing daerah melalui prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Nilai tambah merefleksikan produktivitas perekonomian setidaknya dalam jangka pendek.
2. Akumulasi modal mutlak diperlukan untuk meningkatkan daya saing dalam jangka panjang.
3. Kemakmuran suatu daerah mencerminkan kinerja ekonomi di masa lalu.
4. Kompetisi yang didorong mekanisme pasar akan meningkatkan kinerja ekonomi suatu daerah. Semakin ketat kompetisi pada suatu perekonomian daerah, maka akan semakin kompetitif perusahaan-perusahaan yang akan bersaing secara internasional maupun domestik.
5. Keterbukaan

Indikator keterbukaan merupakan ukuran seberapa jauh perekonomian suatu daerah berhubungan dengan daerah lain yang tercermin dari perdagangan daerah tersebut dengan daerah lain dalam cakupan nasional dan internasional. Indikator ini menentukan daya saing melalui prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Keberhasilan suatu daerah dalam perdagangan internasional merefleksikan daya saing perekonomian daerah tersebut.
2. Keterbukaan suatu daerah baik dalam perdagangan domestik maupun internasional meningkatkan kinerja perekonomiannya.
3. Investasi internasional mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien ke seluruh penjuru dunia.
4. Daya saing yang didorong oleh ekspor terkait dengan orientasi pertumbuhan perekonomian daerah
5. Mempertahankan standar hidup yang tinggi mengharuskan integrasi dengan ekonomi internasional
6. Sistem Keuangan

Indikator sistem keuangan merefleksikan kemampuan sistem finansial perbankan dan non-perbankan di daerah untuk menfasilitasi aktivitas perekonomian yang memberikan nilai tambah. Sistem keuangan suatu daerah akan mempengaruhi alokasi faktor produksi yang terjadi di perekonomian daerah tersebut. Indikator sistem keuangan ini mempengaruhi daya saing daerah melalui prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Sistem keuangan yang baik mutlak diperlukan dalam menfasilitasi aktivitas perekonomian daerah.
2. Sektor keuangan yang efisien dan terintegrasi secara internasional mendukung daya saing daerah.
3. Infrastruktur dan Sumber Daya Alam

Infrastruktur dalam hal ini merupakan indikator seberapa besar sumber daya seperti modal fisik, geografi, dan sumber daya alam dapat mendukung aktivitas perekonomian daerah yang bernilai tambah. Indikator ini mendukung daya saing daerah melalui prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Modal fisik berupa infrastruktur baik ketersediaan maupun kualitasnya mendukung aktivitas ekonomi daerah.
2. Modal alamiah baik berupa kondisi geografi maupun kekayaan alam yang terkandung di dalamnya juga mendorong aktivitas perekonomian daerah.
3. Teknologi informasi yang maju merupakan infrastruktur yang mendukung berjalannya aktivitas bisnis di daerah yang berdaya saing.
4. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Ilmu pengetahuan dan teknologi mengukur kemampuan daerah dalam ilmu pengetahuan dan teknologi serta menerapnya dalam aktivitas ekonomi yang meningkatkan nilai tambah. Indikator ini mempengaruhi daya saing daerah melalui beberapa prinsip di bawah ini:

1. Keunggulan kompetitif dapat dibangun melalui aplikasi teknologi yang sudah ada secara efisien dan inovatif.
2. Investasi pada penelitian dasar dan aktivitas yang inovatif yang menciptakan pengetahuan baru sangat krusial bagi daerah ketika melalui tahapan pembangunan ekonomi yang lebih maju.
3. Investasi jangka panjang berupa R&D akan meningkatkan daya saing sektor bisnis.
4. Sumber Daya Manusia

Indikator sumber daya manusia dalam kal ini ditujukan untuk mengukur ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia. Faktor SDM ini mempengaruhi daya saing daerah berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

1. Angkatan kerja dalam jumlah besar dan berkualitas akan meningkatkan daya saing suatu daerah.
2. Pelatihan dan pendidikan adalah cara yang paling baik dalam meningkatkan tenaga kerja yang berkualitas.
3. Sikap dan nilai yang dianut oleh tenaga kerja juga menetukan daya saing suatu daerah.
4. Kualitas hidup masyarakat suatu daerah menentukan daya saing daerah tersebut begitu juga sebaliknya.
5. Kelembagaan

Kelembagaan merupakan indikator yang mengukur seberapa jauh iklim sosial, politik, hukum, dan aspek keamanan maupun mempengaruhi secara positif aktiviatas perekonomian daerah. Pengaruh faktor kelembagaan terhadap daya saing daerah didasarkan pada beberapa prinsip sebagai berikut:

1. Stabilitas sosial dan politik melalui sistem demokrasi yang berfungsi dengan baik merupakan iklim yang kondusif dalam mendorong aktivitas ekonomi daerah yang berdaya saing.
2. Peningkatan daya saing ekonomi suatu daerah tidak akan dapat tercapai tanpa adanya sistem hukum yang baik serta penegakan hukum yang independen.
3. Aktivitas perekonomian ssuatu daerah tidak akan dapat berjalan secara optimal tanpa didukung oleh situasi keamanan yang kondusif.
4. Governance dan Kebijakan Pemerintah

Indikator *Governance* dan kebijakan pemerintah dimaksudkan sebagai ukuran dari kualitas administrasi pemerintahan daerah, khususnya dalam rangka menyediakan infrastruktur fisik dan peraturan-peraturan daerah. Secara umum pengaruh faktor *governance* dan kebijakan pemerintah bagi daya saing daerah dapat didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Dengan tujuan menciptakan iklim persaingan yang sehat intervensi pemerintah dalam perekonomian sebaiknya diminimalkan.
2. Pemerintah daerah berperan dalam menciptakan kondisi sosial yang terprediksi serta berperan pula dalam meminimalkan resiko bisnis.
3. Efektivitas administrasi pemerintah daerah dalam menyediakan infrastruktur dan aturan-aturan berpengaruh terhadap daya saing ekonomi suatu daerah.
4. Efektivitas pemerintah daerah dalam melakukan koordinasi dan menyediakan informasi tertentu pada sektor swasta mendukung daya saing ekonomi suatu daerah.
5. Fleksibilitas pemerintah daerah dalam menyesuaikan kebijakan ekonomi merupakan faktor yang kondusif dalam mendukung peningkatan daya saing daerah.
6. Manajemen Ekonomi Makro

Dalam indikator manajemen dan ekonomi makro pengukuran yang dilakukan dikaitkan dengan pertanyaan seberapa jauh perusahaan di daerah dikelola dengan cara yang inovatif, menguntungkan dan bertanggung jawab. Prinsip­prinsip yang relevan terhadap daya saing daerah diantaranya adalah:

1. Rasio harga/kualitas yang kompetitif dari suatu produk mencerminkankemampuan mangerial perusahaan-perusahaan yang berada di suatu daerah
2. Orientasi jangka panjang manajemen perusahaan akan meningkatkan daya saing daerah dimana perusahaan tersebut berada.
3. Efisiensi dalam aktivitas perekonomian ditambah dengan kemampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan adalah keharusan bagi perusahaan yang kompetitif.
4. Kewirausahaan sangat krusial bagi aktivitas ekonomi pada masa-masa awal.
5. Dalam usaha yang sudah mapan, manajemen perusahaan memerlukan keahlian dalam mengintegrasikan serta membedakan kegiatan-kegiatan usaha

Tabel II.1 Deskripsi Daya Saing Daerah Menurut Indikator Utama



* + 1. **Langkah-Langkah Peningkatan Daya Saing Daerah**

Dalam upaya mencapai keunggulan daya saing nasional diperlukan langkah-langkah konkrituntuk melakukan harmonisasi kebijakan dan peraturan di tingkat pusat dan daerah, serta melakukan sinergi peraturan dan kebijakan antara pusat dan daerah. Untuk itu diperlukan upaya di setiap kementerian/lembaga dan daerah untuk dapat melaksanakan tugas danfungsinya dengan baik dan melakukan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Presiden telah menetapkan 9 (sembilan) direktif pada Raker III di Bogor tahun 2010 yang mengamanatkan bahwa peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat perlu ditingkatkan demi tercapainya sinergi pusat dan daerah serta efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga di daerah. Selanjutnya telah dipersiapkan revisi PP Nomor 19/2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi. Dalam hal ini peran Gubernur dalam menjalankan fungsi koordinasi, pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi sertafasilitasi pembangunan Kabupaten/Kota di wilayah provinsinya akan diperkuat termasuk koordinasi perencanaan pembangunan. Selanjutnya juga telah diterbitkan Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, MenteriKeuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0442/M.PPN/11/2010; SE-696/MK 2010;120/4693/SJ tentang Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga di Daerah serta Peningkatan Peran Aktif Gubernur Selaku Wakil Pemerintah Pusat.

Sinergi kebijakan pembangunan antara pusat dan daerah serta antar daerah, khususnyadalam kerangka perencanaan kebijakan diperlukan untuk:

* 1. Memperkuat koordinasi antar pelaku pembangunan di pusat dan daerah;
  2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antarruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
  3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
  4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat di semua tingkatan pemerintahan; serta
  5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan

Sedangkan upaya bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dapat dilakukan antara lain:

1. Sinergi berbagai dokumen perencanaan pembangunan (RPJPN dan RPJPD, RPJMN dan RPJMD, RKP dan RKPD);
2. Sinergi dalam penetapan target pembangunan;
3. Standarisasi indikator pembangunan yang digunakan oleh kementerian/lembaga dansatuan perangkat kerja daerah;
4. Pengembangan *database* dan sistem informasi pembangunan yang lengkap danakurat;
5. Sinergi dalam kebijakan perijinan investasi di daerah; dan
6. Sinergi dalam kebijakan pengendalian tingkat inflasi.
   * 1. **Peranan Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Dalam Peningkatan Iklim Investasi Sebagai Bagian Dari Peningkatan Daya Saing Daerah**

Peran konkrit yang perlu dikoordinasikan antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota adalah berbagai sektor diantaranya : Perijinan , penyediaan lahan untuk kegiatan industri, percepatan pembangunan infrastruktur, Penciptaan lapangan pekerjaan,

Untuk pelaksanaan program utama dan kegiatan utama dimaksud, maka dibutuhkankerjasama dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menciptakan iklim usaha daniklim investasi yang baik di daerah sesuai dengan sektor unggulan di masing-masing daerah.

Peran Pemerintah Daerah khususnya dalam perbaikan iklim investasi dan iklim usaha,diantaranya:

1. Perbaikan kepastian hukum yang dilakukan melalui reformasi regulasi secarabertahap di daerah sehingga terjadi harmonisasi peraturan perundang-undanganuntuk lebih meningkatkan kejelasan dan konsistensi dalam implementasinya;
2. Penyederhanaan prosedur dilakukan melalui Penerapan Sistem Pelayanan Informasidan Perijinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) pada Pelayanan Terpadu SatuPintu (PTSP) di 50 kabupaten/ kota dengan arah kebijakan yaitu penerapan SPIPISE diPTSP sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas PTSP;
3. Pembatalan Perda bermasalah dan pengurangan biaya untuk memulai usaha seperti Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
4. Perbaikan logistik nasional dan daerah dilakukan melalui pengembangan danpenetapan Sistem Logistik Nasional yang menjamin kelancaran arus barang danmengurangi biaya transaksi/ekonomi biaya tinggi serta didukung oleh infrastruktur yang memadai melalui skema pendanaan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS);
5. Dalam mendukung pengembangan KEK yang direncanakan di 5 lokasi sampai tahun2012;
6. Pelaksanaan sinkronisasi kebijakan ketenagakerjaan dan iklim usaha di daerah;
7. Dukungan pertanahan untuk mendukung iklim investasi.
   1. **Kompetensi Inti** 
      1. **Definisi dan Karakteristik Kompetensi Inti**

*Berge, Z. et al, (2002)* mengatakan sangat banyak definisi kompetensi yang berbeda yang menghasilkan rentang framework yang luas akan tetapi tidak semuanya cocok dan hal ini masih terus diperdebatkan. Beberapa definisi kompetensi yang seringkali dipergunakan disajikan berikut ini :

* *Spencer (1993:9)* mendefinisikan kompetensi “*an underlying characteristic of individual that is causally related to criterion-referenced effective and/or superior performance in a job or situation*” (Kompetensi sebagai karakteristik individu yang melekat kompetensi merupakan bagian dari kepribadian individu yang relatif dalam dan stabil, dan dapat dilihat serta diukur dari perilaku individu yang bersangkutan, di tempat kerja atau dalam berbagai situasi).
* Schroeder seperti yang dikutip oleh *Stuart, R. and Lindsay, P. (1997)* mendefinisikan kompetensi sebagai karakter, sifat, pengetahuan, skill dan motivasi pokok seorang pemegang jabatan yang telah dikaitkan secara kausalitas dengan managerial performance yang unggul.
* *Becker et al (2001)* mengatakan kompetensi mengacu pada karakter knowledge, skill, abilities setiap individu atau karakter personal yang mempengaruhi *job performance* individu secara langsung.
* *Antonacopoulou, E. and Fitz Gerald, L. (1996)* menyebutkan kompetensi terdiri dari sifat-sifat unik setiap individu yang diekspresikan dalam proses interaksi dengan pihak lain dalam konteks sosial, jadi tidak hanya terbatas pada pengetahuan dan skill yang spesifik atau standar kinerja yang diharapkan dan perilaku yang diperlihatkan. Jadi kompetensi mencakup sikap, persepsi dan emosi serta menekankan pada faktor interaksi personal dan sosial.
* *Mc Connell (1998)* menyampaikan dua istilah kompetensi yang sering digunakan yaitu *competence* dan *competency* dimana keduanya bukanlah sinonim. *Competence* maksudnya kemampuan potensial, kesanggupan menjalankan fungsi pada suatu situasi, sedangkan *competency* fokus pada kinerja aktual seseorang dalam suatu situasi. Jadi *competence* dibutuhkan sebelum mencapai *competency*.
* *Prahalad dan Hamel (1990)* merupakan sekumpulan sumber daya dan kemampuan (aset-aset) organisasi yang memiliki keunikan tinggi yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi; dimana keunikan ini sulit untuk ditiru.

Lebih lanjut *Spencer (1993:15)* menguraikan bahwa kompetensi dapat diklasifikasikan dari berbagai sudut padang yang berbeda. Definisi kompetensi diperluas dan bersifat lebih umum, dimana menurut substansinya, kompetensi bisa dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu kompetensi umum (*generic competencies atau soft competencies*) dan kompetensi bidang (*hard competencies*).

Sebagai karakteristik individu yang melekat, *Spencer (1993:9-23)* mengemukakan kompetensi dapat bersumber dari lima jenis sumber kompetensi yang berbeda, yaitu:

1. Motif. Sesuatu yang secara konsisten menjadi dorongan, pikiran atau keinginan seseorang yang menyebabkan munculnya suatu tindakan. Motif akan mengarahkan dan menyeleksi sikap menjadi tindakan atau mewujudkan tujuan sehingga berbeda dari yang lain.
2. Karakter (*trait*) dan unsur bawaan. Karakter dan bawaan seseorang dapat mempengaruhi prestasi di tempat kerja. Karakter dan unsur bawaan ini dapat berupa bawaan fisik (seperti postur atletis, penglihatan yang baik), maupun bawaan sifat yang lebih kompleks yang dimiliki seseorang sebagai karakter, seperti kemampuan mengendalikan emosi, perhatian terhadap hal yang sangat detail, dan sebagainya.
3. Konsep diri (*self-concept*). Konsep diri seseorang mencakup gambaran atas diri sendiri, sikap dan nilai-nilai yang diyakininya. Misalnya, seseorang yang memiliki rasa percaya diri yang tinggi menggambarkan dirinya sendiri sebagai orang yang dapat mencapai sesuatu yang diharapkan, yang menurutnya, baik dalam berbagai situasi, baik situasi sulit maupun mudah.
4. Pengetahuan (*knowledge*). Pengetahuan mencerminkan informasi yang dimiliki seseorang pada area disiplin yang tertentu yang spesifik. Nilai akademis atau indeks prestasi akademis seringkali kurang bermanfaat untuk memprediksi performansi di tempat kerja, karena sulitnya mengukur kebutuhan pengetahuan dan keahlian yang secara nyata digunakan dalam pekerjaan. Pengetahuan dapat memprediksikan apa yang mampu dilakukan seseorang, bukan apa yang akan dilakukan. Hal ini disebabkan pengukuran tes pengetahuan lebih banyak menghafal, jika yang dipentingkan adalah kemampuan untuk mencari informasi. Ingatan mengenai fakta spesifik, tidak lebih penting daripada pengetahuan mengenai fakta yang relevan, terhadap masalah spesifik dan pengetahuan tentang sumber informasi di mana mencarinya ketika diperlukan. Tes pengetahuan juga sangat tergantung situasi responden. Tes tersebut mengukur kemampuan memilih alternatif pilihan, yang merupakan respon yang benar, dan bukan untuk mengukur apakah seseorang dapat bereaksi sesuai dengan pengetahuan dasarnya. Mengetahui sesuatu yang benar tidaklah selalu menjamin akan melakukan sesuatu yang benar.
5. Keterampilan. Kemampuan untuk melakukan aktivitas fisik dan mental. Kompetensi keterampilan mental atau kognitif meliputi pemikiran analitis (memproses pengetahuan atau data, menentukan sebab dan pengaruh, mengorganisasi data dan rencana) serta pemikiran konseptual (pengenalan pola data yang kompleks).

Sudut pandang lain dalam mengklasifikasikan kompetensi, dapat pula ditinjau dari tingkatan kompetensi dan efek tingkat kinerja yang ditimbulkannya. Dalam klasifikasi ini, kompetensi dibedakan menjadi kompetensi minimum (*threshold competencies*) dan kompetensi pembeda individu dengan kinerja superior dan rata-rata (*differentiating competencies*).

Kompetensi minimum, menunjukkan suatu tingkat kompetensi/karakteristik penting yang dibutuhkan seseorang dalam pekerjaannya agar efektif, namun belum mengakibatkan individu tersebut memiliki performansi superior atau di atas rata-rata.Sedangkan kompetensi pembeda kinerja, merupakan tingkat kompetensi yang dapat membedakan performansi superior atau sukses dari yang rata-rata.

Pada tingkat organisasi, kompetensi dapat pula diklasifikasikan menurut perannya dalam pencapaian visi misi, bisnis, strategi dan budaya perusahaan.Kompetensi dibedakan menurut kompetensi inti (*core competencies*) dan kompetensi pendukung (*supporting competencies*).Kompetensi inti diperlukan untuk mencapai visi-misi, bisnis, strategi dan budaya perusahaan.Kompetensi yang termasuk inti memiliki kontribusi dan keterkaitan yang jelas terhadap visi-misi, bisnis, strategi dan budaya perusahaan.Biasanya kelompok kompetensi ini diwajibkan untuk dimiliki oleh seluruh anggota perusahaan, karena diyakini memberikan nilai tambah dan meningkatkan kemampuan bersaing perusahaan. Misalnya, sebuah perusahaan memiliki visi untuk “mengutamakan kepuasan pelanggan”, maka kompetensi *Costumer Service Orientation* (CSO) merupakan kompetensi yang diwajibkan untuk dimiliki oleh seluruh pegawainya. Sedangkan untuk kompetensi pendukung biasanya diperlukan oleh bagian atau unit organisasi perusahaan dalam menjaga kelancaran dan efektifitas operasional perusahaan.Bidang dan tingkat kompetensi pendukung biasanya spesifik untuk bagian atau organisasi perusahaan.

* + 1. **Dimensi Kompetensi Inti**

Dari hasil studi beberapa literatur tipe dimensi yang digunakan dalam kompetensi generik, antara lain:

* Intensitas atau Derajat Penyelesaian Kegiatan *(Intensity or Completeness of Action)*. Dimensi ini merupakan skala utama kompetensi yang menggambarkan intensitas maksud dan terselesaikannya tindakan untuk merealisasikan maksud tersebut.
* Besarnya Dampak *(Size of Impact)*. Dimensi ini menggambarkan jumlah dan posisi orang yang terkena pengaruh/dampak, atau sejauh mana orang dipengaruhi. Dimensi ini juga menunjukkan lingkup masalah yang terlibat. Lingkup kerja dan level organisasi berpengaruh besar terhadap dimensi ini, dan akan lebih berguna jika membandingkan pekerjaan dari pada membandingkan individu dalam pekerjaan yang sama.
* Kompleksitas *(Compexity).* Dimensi kompleksitas merupakan skala utama pada beberapa kompetensi, terutama kompetensi pemikiran.
* Besarnya Usaha *(Ammount of Effort)*. Dimensi ini menyatakan besarnya usaha tambahan atau waktu ekstra yang harus diberikan dalam kaitannya dimensi kompetensi pertama.
* Ukuran Khusus/Spesifik *(Unique Dimensions).* Beberapa kompetensi memiliki dimensi khusus yang unik yang tidak tercakup dalam keempat dimensi kompetensi yang telah disebutkan, sehingga dimensi terpisah digunakan.

Pada umumnya setiap kompetensi memiliki dimensi lebih dari satu. Beberapa kompetensi memiliki dua atau lebih dimensi, misalnya orientasi pencapaian memiliki tiga dimensi yaitu: intensitas dan kekompletan tindakan yang memotivasi pencapaian, pengaruh pencapaian, dan derajat inovasi

* + 1. ***Framework* Kompetensi Inti**

*Robotham. D and Jubb R. (1996)* mengatakan pendekatan kompetensi menawarkan *framework* pada organisasi untuk memusatkan perhatian (*fokus*) pada sumberdaya mereka dalam upaya memaksimalkan keefektifan strategi manajemen pengembangan (*management development strategies*) meskipun masih belum cukup jelas kemana acuan kompetensi itu - dan hal ini merupakan kelemahan yang cukup serius dalam mengklarifikasi kompetensi, serta masih cukup membingungkannya eksistensi perspektif kompetensi ke dalam keperilakuan dan basis keterampilan (*skill-based*).Meskipun masih ada kekurangan dan kelemahan dari kompetensi (*competence-based*) ini masih dapat dimanfaatkan oleh organisasi atau perusahaan dalam penilaian kinerja dan masih dapat disesuaikan dengan kondisi perusahaan, misalnya pada perusahaan yang menginginkan keunggulan kompetitif, karena sistem kompetensi terbukti menggiring perusahaan mencapai kinerja perusahaan yang lebih baik. Framework kompetensi telah menarik perhatian kalangan bisnis ketika harus berhadapan dengan kebutuhan mengembangkan kecakapan seseorang dan hal ini mengharuskan adanya transformasi yang berkelanjutan.

* 1. **Tabel Posisi Usulan Penelitian**

Tabel II.2 Posisi usulan penelitian

| **No.** | **Penelitian** | **Judul** | **Tahapan dan Metoda Analisis** | **Performansi** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aurino Djamaris (2007) | Kajian Pengembangan Kompetensi Inti Daerah Kabupaten Bandung | LQ, FGD, AHP, SWOT | Kompetensi Inti Industri Daerah |
| 2. | Daryono Soebagiyo (2007) | Penentuan Kompetensi Produk Inti Daerah di Kota Solo | LQ, FGD, AHP, SWOT | Kompetensi Inti Industri Daerah |
| 3. | Daryono Soebagiyo, M. Wahyudi (2008) | Analisis Kompetensi Produk Unggulan Daerah pada Batik Tulis dan Cap Solo di DATI II Kota Surakarta | LQ, FGD, AHP, SWOT | Kompetensi Inti Industri Daerah |
| 4. | Rahman Nurcahyo, dkk (2011) | Perancangan Strategi Pengembangan Industri di Kabupaten Tangerang Berbasis Kompetensi Inti | LQ, FGD, AHP, SWOT | Kompetensi Inti Industri Daerah |
| 5. | Suroso, A., Setyanto, R., & Rudianto, D. (2011) | *Pengembangan Ekonomi Lokal Kabupaten Banyumas* | LQ, FGD, AHP, SWOT | Kompetensi Inti Industri Daerah |
| 6.. | Thomas Ola Langoday (2011) | Studi Kompetensi Inti Daerah Di Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur | LQ, FGD, AHP, SWOT | Kompetensi Inti Industri Daerah |
| 7. | Nurcahyo, R., Fahrizal, E., & Stiadi, S. (2012) | Penentuan Dan Pengembangan Kompetensi Inti Kabupaten  Bekasi | LQ, FGD, AHP, SWOT | Kompetensi Inti Industri Daerah |
| 9. | Rahab. (2012) | Kajian Konseptual Mengenai Strategi Pengembangan Batik Banyumas Sebagai Produk  Unggulan Lokal Melalui Strategi Perbaikan Kualitas | LQ, FGD, AHP, SWOT | Kompetensi Inti Industri Daerah |
| 10. | Palmarudi Mappigau, Hastan (2012) | Core Competence And Sustainable Competitive Adventage Of Small Silk Weaving Industries (Sis) In Wajo District, South Sulawesi | LQ, FGD, AHP, SWOT | Kompetensi Inti Industri Daerah |
| 11. | Rahab, Najmudin, Istiqomah (2013) | Local Economic Development Strategy Based on Local Industrial Core Competence | LQ, FGD, AHP, SWOT | Kompetensi Inti Industri Daerah |
| 12. | Palmarudi Mappigau, Haris Maupa (2015) | Regional Core Competence on the Basis of Small Scale Industries (SSIS) : Case of Makassar City, Indonesia | LQ, FGD, AHP, SWOT | Kompetensi Inti Industri Daerah |
| 13. | Nurul Anwar, Rahab, Rawuh Edy Priyono (2015) | Core Competence of Batik Banyumas Industry : Problems And Challaenge To Createsustainable Competitive Advantage | LQ, FGD, AHP, SWOT | Kompetensi Inti Industri Daerah |
| 14. | Prof. Ronald L. Martin (2002) | A Study on The Factor of Regional Competitivness | Analisis Ekonometriks | Daya Saing Daerah |
| 15. | Barney Jay (1991) | *Firm Resources and Sustaned Competitive Advantage* | Resource-Based View (RBV) | Daya Saing Perusahaan |
| 16. | Akio Tokuda (2005) | *The Critical Assessment of The Resource-Based View of Strategic Management : The Source of Heterogeneity of The Firm* | Resource-Based View (RBV) | Daya Saing Perusahaan |
| 17. | Josef Windsperger (2006) | A Resource-Based View Of Competitive Advantage of Cities | Porter’s Diamond Model, Resources-Based View | Daya Saing Daerah |
| 18. | Bin Liu, Jie Hu, Meilu Tian (2012) | Research on the Core Competence and Sustainable Development of Small and Medium-Sized Enterprises | Inovasi Teknologi, Reasona8.ble Management Organization Way, Strenthening the Training of Independent Brand Consciousness | Daya Saing Industri untuk IKM |
| 19. | Penelitian ini | Model Pengembangan Kompetensi Inti Industri Daerah (KIID) Di Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara | LQ, Fuzzy, SWOT dan RBV. | Kompetensi Inti In dustri Daerah |